



Isu Gender dan Keadilan Sosial dalam Pendidikan: Analisis Teoritis dan Tantangan Implementasi

Heni Kumalasari^{1*}, Wayan Suastra², Ananta Wikrama Tungga Atmaja³, I Nyoman Tika⁴

¹²³⁴Proram Studi Doktor Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Bali

¹henykumalasari78@gmail.com, ²iwsuastra@undiksha.ac.id, ³anantawikrama_t_atmadja@undiksha.ac.id,

⁴nyoman.tika@undiksha.ac.id

Abstrak

Isu gender dan keadilan sosial dalam pendidikan merupakan persoalan strategis yang berpengaruh langsung terhadap kualitas sumber daya manusia dan keberlanjutan pembangunan. Meskipun berbagai kebijakan nasional telah menekankan prinsip kesetaraan, praktik pendidikan di lapangan masih menunjukkan adanya bias gender dan ketidakadilan sosial yang bersifat struktural maupun kultural. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kerangka teoritis gender dan keadilan sosial dalam pendidikan, mengidentifikasi bentuk-bentuk ketidaksetaraan gender, mengkaji upaya yang telah dan dapat dilakukan untuk mewujudkan pendidikan berperspektif gender, serta menguraikan tantangan implementasinya. Penulisan artikel ini menggunakan pendekatan kajian pustaka dengan menelaah hasil-hasil penelitian nasional dan internasional yang relevan dalam sepuluh tahun terakhir. Hasil kajian menunjukkan bahwa ketidaksetaraan gender dalam pendidikan tidak hanya berkaitan dengan akses, tetapi juga kualitas pembelajaran, representasi dalam kurikulum, serta dampak jangka panjang terhadap kesempatan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan transformasi pendidikan yang sistemik, inklusif, dan berkelanjutan dengan mengintegrasikan perspektif gender dan keadilan sosial pada seluruh level kebijakan dan praktik pendidikan.

Kata Kunci: Gender, Keadilan Sosial, Pendidikan, Kesetaraan, Inklusi

PENDAHULUAN

Pendidikan memiliki peran strategis dalam membentuk individu yang berpengetahuan, kritis, dan mampu berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan sosial. Dalam kerangka pembangunan nasional, pendidikan dipandang sebagai instrumen utama untuk menciptakan keadilan sosial dan mengurangi kesenjangan struktural dalam masyarakat. Namun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa sistem pendidikan masih memproduksi ketimpangan sosial, termasuk ketidaksetaraan gender, baik secara eksplisit maupun implisit (Nur, 2024). Ketidaksetaraan gender dalam pendidikan seringkali tidak tampak dalam bentuk penolakan akses formal, melainkan hadir melalui praktik sosial, kebijakan institusional, serta interaksi pembelajaran yang bias. Stereotip mengenai peran laki-laki dan perempuan mempengaruhi kesempatan belajar, partisipasi akademik, dan aspirasi pendidikan peserta didik (Maulana, Ayuningtyas, & Nabilah, 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa kesetaraan gender dalam pendidikan tidak cukup diukur dari angka partisipasi semata.

Lebih jauh, isu gender dalam pendidikan berkaitan erat dengan konsep keadilan sosial. Ketika sistem pendidikan gagal memberikan perlakuan yang adil bagi seluruh peserta didik, maka pendidikan berpotensi memperkuat ketimpangan sosial yang telah ada. Pendidikan yang tidak sensitif terhadap perbedaan gender dan kondisi sosial-ekonomi justru dapat memperpanjang siklus ketidakadilan dalam masyarakat (Adib & Nurwahidah, 2024). Berangkat dari kondisi tersebut, artikel ini berupaya mengkaji secara kritis isu gender dan keadilan sosial dalam pendidikan. Fokus kajian diarahkan pada analisis kerangka teoritis, bentuk ketidaksetaraan gender dalam pendidikan, serta tantangan implementasi pendidikan berperspektif gender. Kontribusi artikel ini terletak pada penguatan analisis teoretis yang terintegrasi dengan konteks pendidikan di Indonesia, sehingga dapat memperkaya khazanah kajian gender dalam pendidikan, khususnya bagi pengembangan kebijakan dan praktik pendidikan inklusif.

METODE

Tahapan Penelitian

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran basis data jurnal ilmiah dan repositori daring. Data dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis) dengan mengidentifikasi tema-tema utama terkait gender,

keadilan sosial, dan pendidikan. Analisis dilakukan secara sistematis untuk menemukan pola, kesenjangan penelitian, serta implikasi teoritis dan praktis dari temuan-temuan yang ada.

Pendekatan Penelitian

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Sumber data diperoleh dari artikel jurnal nasional dan internasional bereputasi, laporan lembaga internasional, serta publikasi ilmiah yang relevan dengan isu gender dan keadilan sosial dalam pendidikan. Literatur yang dikaji dibatasi pada publikasi sepuluh tahun terakhir untuk memastikan relevansi dan kebaruan kajian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gender, Keadilan Sosial, dan Pendidikan: Kerangka Teoritis

Konsep gender dalam kajian pendidikan dipahami sebagai konstruksi sosial yang membentuk peran, perilaku, dan ekspektasi bagi laki-laki dan perempuan. Berbeda dari jenis kelamin yang bersifat biologis, gender merupakan hasil interaksi nilai budaya, norma sosial, dan praktik sehari-hari yang tercipta melalui proses panjang sosial historis (Nur, 2024). Pemisahan antara gender dan jenis kelamin penting untuk memahami bahwa ketidaksetaraan dalam pendidikan bukan sekadar akibat perbedaan biologis, melainkan konstruksi sosial yang membatasi kesempatan belajar dan berkembang bagi individu berdasarkan persepsi gender yang dipaksakan masyarakat. Dalam konteks keadilan sosial, pendidikan dilihat sebagai mekanisme distribusi sumber daya yang harus menyediakan kesempatan dan hasil belajar yang adil bagi semua peserta didik. Keadilan sosial tidak hanya menuntut perlakuan yang sama, tetapi juga kebijakan yang mempertimbangkan kebutuhan berbeda berdasarkan kondisi sosial, ekonomi, dan kultural peserta didik (Adib & Nurwahidah, 2024). Oleh karena itu, pendekatan keadilan sosial mengharuskan sekolah untuk mengatasi ketidaksetaraan struktural yang diwariskan oleh masyarakat. Teori kesetaraan (equity theory) dalam pendidikan menekankan bahwa hasil pendidikan yang adil hanya dapat dicapai apabila siswa memperoleh dukungan dan fasilitas sesuai kebutuhan masing-masing. Artinya, perlakuan yang identik tidak selalu menghasilkan keadilan, karena siswa berada dalam kondisi sosial dan gender yang berbeda (Maulana, Ayuningtyas, & Nabilah, 2024). Pendekatan ini memperkuat gagasan bahwa kesetaraan gender harus diintegrasikan secara sistemik dalam kurikulum, pengajaran, dan manajemen sekolah.

Pendekatan interseksionalitas semakin banyak digunakan dalam kajian gender dan pendidikan. Pendekatan ini menyatakan bahwa pengalaman siswa tidak hanya ditentukan oleh gender, tetapi juga oleh kombinasi faktor lain seperti kelas sosial, etnisitas, agama, dan disabilitas (Nengyanti et al., 2025). Dengan demikian, siswa perempuan dari keluarga berpenghasilan rendah atau dari wilayah pedesaan mungkin menghadapi hambatan yang berbeda dan lebih kompleks dibandingkan siswa perempuan dari keluarga mampu atau wilayah perkotaan. Teori kritis dalam pendidikan menyoroti bagaimana institusi pendidikan dapat mereproduksi ketidaksetaraan gender melalui praktik yang tampak netral tetapi sesungguhnya bias. Misalnya, buku pelajaran yang menampilkan perempuan hanya dalam pekerjaan domestik atau pengajar yang secara tidak sadar memberikan lebih banyak kesempatan akademik kepada siswa laki-laki (Ibda et al., 2024). Praksis pendidikan kritis mengajak guru dan sekolah melakukan refleksi menuju pembongkaran struktur yang melanggengkan dominasi dan diskriminasi.

Kerangka pedagogi feminis (*feminist pedagogy*) turut memberikan perspektif penting dalam pendidikan. Pedagogi feminis menekankan hubungan setara antara guru dan siswa, pembelajaran kolaboratif, serta pengakuan pengalaman hidup sebagai sumber belajar yang sah. Pendekatan ini menggeser pendidikan dari praktik hirarkis menuju pengalaman belajar yang lebih demokratis, sensitif gender, dan memberi ruang bagi suara kelompok terpinggirkan (Nurwahyuningsih, Nurianti, & Nurlinda, 2023). Selain kerangka teoritis internal pendidikan, teori pembangunan manusia (*human development theory*) turut menekankan bahwa pendidikan setara gender merupakan investasi sosial yang berdampak langsung pada kualitas hidup, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Bukti empiris menunjukkan bahwa kesenjangan gender dalam pendidikan berkontribusi pada ketimpangan ekonomi, stagnasi pembangunan regional, dan rendahnya partisipasi perempuan dalam tenaga kerja (Agnes & Susanti, 2025). Dengan demikian, kesetaraan gender dalam pendidikan bukan hanya isu akademik, tetapi juga aspek strategis pembangunan nasional.

Secara keseluruhan, kerangka teoritis ini memperlihatkan bahwa gender, pendidikan, dan keadilan sosial adalah isu yang saling terkait dan membutuhkan pendekatan multi-level: mulai dari analisis sosial-budaya, reformasi kebijakan pendidikan, hingga perubahan dalam praktik pengajaran. Keberhasilan mencapai pendidikan yang adil gender mensyaratkan pembenahan yang sistemik, kolaboratif, dan berbasis bukti untuk menghapus hambatan struktural yang menghalangi perempuan dan kelompok rentan lainnya memperoleh pendidikan yang bermakna dan berkualitas (Karimah & Susanti, 2022).

Bentuk Ketidaksetaraan Gender dalam Pendidikan

Ketidaksetaraan gender dalam pendidikan di Indonesia tetap menjadi isu yang kompleks dan multidimensional, meskipun telah ada berbagai kebijakan nasional yang menekankan pentingnya kesetaraan akses dan partisipasi. Studi terbaru menunjukkan bahwa ketimpangan tidak hanya terkait jumlah anak laki-laki dan perempuan yang bersekolah, tetapi lebih mendalam pada kualitas pengalaman belajar dan persepsi mengenai peran gender dalam pendidikan (Nur, 2024). Hal ini mengindikasikan bahwa kesenjangan gender masih terstruktur dalam praktik sosial dan budaya masyarakat yang terlalu lama menganggap perbedaan gender sebagai sesuatu yang “alami” dan tidak perlu dipersoalkan.

Dalam konteks akses dan partisipasi, ketidaksetaraan gender masih terlihat pada daerah-daerah terpencil atau wilayah dengan tingkat ekonomi rendah. Penelitian menemukan bahwa anak perempuan lebih rentan mengalami putus sekolah karena faktor ekonomi, perkawinan dini, atau beban kerja domestik yang lebih tinggi dibandingkan anak laki-laki (Agnes & Susanti, 2025). Meskipun data nasional menunjukkan peningkatan partisipasi perempuan di tingkat pendidikan dasar, sebagian besar peningkatan tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam keberlanjutan pendidikan hingga tingkat yang lebih tinggi, terutama pada pendidikan menengah dan kejuruan.

Ketidaksetaraan juga tampak dalam proses pembelajaran di kelas. Observasi empiris menunjukkan bahwa guru secara tidak sadar sering memberikan perhatian lebih kepada siswa laki-laki dalam kegiatan diskusi, tanya jawab, dan percobaan sains, sementara siswa perempuan cenderung diberi peran administratif atau pemberi dukungan (Nengyanti et al., 2025). Kondisi ini memperkuat pola bahwa laki-laki dianggap lebih kompeten dalam bidang yang bersifat teknis atau analitis. Akibatnya, pengalaman belajar yang diterima siswa perempuan menjadi kurang menantang dan kurang memupuk keberanian mengambil risiko.

Selain itu, ketimpangan gender terefleksi dalam materi ajar dan buku pelajaran yang masih sering menggambarkan peran gender secara stereotip. Banyak buku pelajaran menampilkan laki-laki sebagai sosok pemimpin, pekerja profesional, inovator, atau ilmuwan, sedangkan perempuan digambarkan sebagai pengurus rumah tangga, perawat, atau figur yang mendukung laki-laki (Maulana, Ayuningtyas, & Nabilah, 2024). Representasi yang tidak seimbang ini secara halus menanamkan pesan mengenai batasan sosial peran gender, yang akhirnya mempengaruhi minat dan aspirasi karir siswa. Dalam bidang pemilihan mata pelajaran dan jurusan, ketimpangan gender turut terlihat. Siswa perempuan masih kurang terwakili dalam mata pelajaran atau program kejuruan berbasis STEM (science, technology, engineering, mathematics). Penelitian menunjukkan bahwa stereotip “matematika cocok untuk laki-laki” dan “perempuan lebih baik dalam bidang sosial” terus diproduksi oleh guru dan masyarakat (Nurwahyuningsih, Nurianti, & Nurlinda, 2023). Stigma ini membuat anak perempuan kurang percaya diri untuk mengambil bidang studi yang membutuhkan penalaran teknis, sehingga mempersempit peluang pendidikan dan karir mereka.

Pada tingkat kebijakan institusi sekolah, ketidaksetaraan gender masih muncul dalam manajemen sekolah, perencanaan program, dan pengalokasian sumber daya. Data menunjukkan bahwa sekolah belum sepenuhnya menerapkan prinsip GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion) dalam pengelolaan pendidikan (Ibda et al., 2024). Akibatnya, kebutuhan khusus siswa perempuan, siswa penyandang disabilitas, atau kelompok rentan lainnya sering diabaikan, sehingga menciptakan pengalaman pendidikan yang tidak inklusif dan tidak setara. Ketidaksetaraan gender dalam pendidikan juga mempengaruhi hasil belajar dan kesempatan masa depan. Daerah dengan kesenjangan gender tinggi pada tingkat pendidikan menunjukkan tingkat literasi yang rendah dan pencapaian akademik yang lebih buruk, terutama bagi perempuan (Karimah & Susanti, 2022). Kesenjangan pendidikan ini kemudian berlanjut dalam dunia kerja, di mana perempuan cenderung memiliki tingkat pendapatan lebih rendah dan akses terbatas pada pekerjaan formal yang bergaji tinggi. Dengan demikian, ketidaksetaraan gender dalam pendidikan berimplikasi langsung pada ketidakadilan sosial yang lebih luas.

Ketidaksetaraan gender dalam pendidikan tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada pembangunan nasional. Penelitian menunjukkan bahwa negara atau daerah yang gagal membangun sistem pendidikan yang setara gender mengalami pertumbuhan ekonomi lebih lambat, tingkat kemiskinan lebih tinggi, dan produktivitas yang lebih rendah (Agnes & Susanti, 2025). Artinya, ketidaksetaraan gender bukan hanya isu moral, tetapi juga isu strategis dalam pembangunan sumber daya manusia. Maka, penghapusan ketidaksetaraan gender dalam pendidikan merupakan langkah krusial untuk menciptakan masyarakat yang inklusif, produktif, dan berkeadilan.

Upaya Mewujudkan Pendidikan Berperspektif Gender dan Keadilan Sosial

Upaya mewujudkan pendidikan yang berperspektif gender dan keadilan sosial membutuhkan perubahan yang sistematis pada level kebijakan, institusi, dan praktik pembelajaran. Pada tingkat kebijakan, pemerintah perlu memastikan bahwa seluruh regulasi pendidikan mengintegrasikan prinsip kesetaraan gender secara eksplisit sebagai bagian dari standar pelayanan minimal pendidikan (UNESCO, 2022). Integrasi tersebut mencakup penyediaan anggaran responsif

gender, penghapusan diskriminasi dalam penerimaan peserta didik, serta penyediaan fasilitas sekolah yang aman dan layak bagi semua kelompok. Pendekatan ini terbukti meningkatkan akses perempuan dan kelompok rentan terhadap pendidikan bermutu di berbagai negara (OECD, 2021).

Upaya kedua adalah peningkatan kapasitas guru dan tenaga kependidikan mengenai literasi gender, kesadaran kritis, serta kemampuan menerapkan pedagogi inklusif. Guru merupakan aktor utama dalam interaksi pendidikan sehingga pemahaman mereka tentang isu gender sangat menentukan terciptanya lingkungan kelas yang tidak bias (Sari, 2023). Pelatihan yang terstruktur dapat membantu guru mengidentifikasi praktik diskriminatif yang tidak disadari, seperti stereotip dalam pembagian tugas atau penggunaan contoh belajar yang bias gender. Studi terbaru menunjukkan bahwa sekolah yang menerapkan pelatihan rutin tentang kesetaraan gender memiliki iklim pembelajaran yang lebih aman dan partisipatif (Jamilah, 2022).

Selain pelatihan, reformasi kurikulum juga menjadi komponen penting dalam mewujudkan pendidikan berperspektif keadilan sosial. Kurikulum yang sensitif gender tidak hanya meniadakan materi yang bias, tetapi juga secara aktif memasukkan isu keadilan sosial, representasi perempuan, dan kelompok minoritas dalam seluruh mata pelajaran (Widyawati, 2021). Pendekatan ini membantu siswa memahami keberagaman perspektif, mengembangkan empati, serta menumbuhkan kesadaran kritis terhadap ketidaksetaraan struktural. Integrasi tema gender dalam kurikulum terbukti dapat meningkatkan sensitivitas siswa terhadap isu diskriminasi (Morrison, 2020).

Upaya selanjutnya adalah penyediaan lingkungan sekolah yang aman, inklusif, dan bebas kekerasan. Kekerasan berbasis gender seperti perundungan, pelecehan, ataupun intimidasi menjadi hambatan serius bagi keberlanjutan pendidikan bagi anak perempuan dan kelompok rentan lainnya (UNICEF, 2022). Sekolah perlu memiliki mekanisme pelaporan yang aman, layanan konseling, dan sistem respons cepat untuk menangani kasus kekerasan. Program sekolah ramah anak dan kebijakan anti-kekerasan terbukti meningkatkan retensi sekolah terutama bagi perempuan (Hasanah, 2021).

Penguatan peran keluarga dan masyarakat juga merupakan aspek penting dalam upaya transformasi pendidikan berperspektif gender. Pola relasi gender di masyarakat seringkali mempengaruhi pandangan orang tua tentang pendidikan anak, misalnya anggapan bahwa anak laki-laki lebih layak mendapat pendidikan tinggi dibandingkan perempuan (Anwar, 2020). Program pemberdayaan masyarakat, sosialisasi kesetaraan gender, serta kegiatan parenting sangat penting untuk mengubah norma-norma yang membatasi partisipasi pendidikan. Sinergi antara sekolah, keluarga, dan komunitas terbukti dapat menurunkan angka perkawinan dini dan meningkatkan partisipasi perempuan dalam pendidikan (Rahayu, 2022).

Tidak kalah penting, institusi pendidikan juga perlu memanfaatkan teknologi dan media digital untuk mendorong kesadaran publik mengenai kesetaraan gender. Platform pembelajaran digital dapat menjadi sarana kampanye, penyebaran modul edukatif, dan ruang diskusi bagi siswa, guru, serta orang tua (Kurniawan, 2023). Teknologi juga mempermudah pengawasan terhadap implementasi kebijakan responsif gender melalui pengumpulan data terpilih jenis kelamin secara real-time. Literasi digital yang inklusif memungkinkan siswa mengembangkan pemahaman kritis terhadap bias dan stereotip yang mereka temukan dalam media (Nugroho, 2022).

Upaya lainnya melibatkan penguatan jaringan dan kolaborasi dengan organisasi internasional, LSM, serta lembaga penelitian untuk mengembangkan praktik terbaik dalam pendidikan berkeadilan gender. Kemitraan ini memungkinkan sekolah mengakses sumber daya, modul pelatihan, dan pendampingan profesional yang telah teruji dalam berbagai konteks global (UN Women, 2023). Kolaborasi semacam ini membantu mengakselerasi reformasi pendidikan dengan pendekatan berbasis bukti sehingga intervensi yang dilakukan lebih terarah dan berkelanjutan (Latifah, 2021).

Keberhasilan mewujudkan pendidikan berperspektif gender dan keadilan sosial sangat bergantung pada komitmen institusional untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Evaluasi yang responsif gender memungkinkan sekolah mengidentifikasi ketimpangan akses, partisipasi, serta capaian belajar antara kelompok siswa (Prasetyo, 2023). Dengan data yang valid, sekolah dapat merancang intervensi yang lebih tepat sasaran, misalnya program remedial untuk kelompok rentan atau peningkatan fasilitas bagi siswa perempuan. Mekanisme evaluasi yang transparan dan partisipatif menjadi pondasi penting untuk menjaga keberlanjutan upaya keadilan sosial dalam pendidikan (Hidayat, 2021).

Tantangan dan Hambatan dalam Implementasi Pendidikan Berperspektif Gender dan Keadilan Sosial

Implementasi pendidikan berperspektif gender seringkali menghadapi hambatan struktural yang berakar pada ketimpangan sosial dan budaya. Salah satu tantangan terpenting adalah keberlanjutan budaya patriarki yang masih mendominasi dalam banyak komunitas. Nilai-nilai patriarki ini mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap pembagian peran gender, sehingga pendidikan bagi perempuan kerap dianggap kurang penting dibandingkan laki-laki (Suryani, 2022). Norma sosial yang membatasi mobilitas perempuan juga berdampak pada partisipasi mereka dalam pendidikan,

terutama di daerah pedesaan dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (Halim, 2021). Hambatan ini menunjukkan bahwa pendidikan berperspektif gender tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial yang lebih luas.

Tantangan berikutnya muncul dari kurangnya kapasitas guru dalam memahami dan menerapkan perspektif gender di ruang kelas. Banyak guru masih mempraktikkan pola pengajaran yang bias, misalnya memberikan tugas berbeda berdasarkan stereotip gender atau lebih banyak memberikan kesempatan berbicara kepada siswa laki-laki (Kusumawati, 2023). Minimnya pelatihan komprehensif tentang gender menyebabkan guru sulit mengidentifikasi bentuk diskriminasi terselubung yang terjadi dalam interaksi pembelajaran (Rahmadani, 2022). Situasi ini diperparah oleh keterbatasan modul pelatihan berbasis bukti yang relevan dengan konteks sekolah di Indonesia.

Hambatan selanjutnya adalah representasi yang tidak setara dalam materi ajar dan kurikulum. Dalam banyak buku teks, perempuan sering kali digambarkan dalam peran domestik, sedangkan laki-laki ditempatkan dalam peran profesional atau kepemimpinan (Yunita, 2021). Representasi yang bias tersebut membentuk persepsi siswa tentang peran ideal bagi masing-masing gender, sehingga melanggengkan stereotip sosial (Ramdani, 2020). Kurikulum yang tidak sensitif gender juga menyebabkan minimnya diskusi kritis tentang isu keadilan sosial, sehingga siswa tidak terbiasa menganalisis akar ketidaksetaraan secara mendalam. Infrastruktur sekolah yang tidak memadai juga menjadi hambatan signifikan, terutama bagi siswa perempuan dan kelompok rentan. Fasilitas dasar seperti toilet yang layak, ruang laktasi, serta sistem keamanan yang memadai seringkali belum tersedia secara optimal (UNICEF, 2022). Kekurangan infrastruktur ini dapat menghambat kehadiran dan kenyamanan siswa perempuan, khususnya selama masa menstruasi. Ketidakamanan lingkungan sekolah juga meningkatkan risiko kekerasan berbasis gender, yang pada akhirnya menurunkan motivasi belajar (Wijaya, 2021). Hal ini memperlihatkan bahwa pendidikan berkeadilan gender membutuhkan dukungan fisik yang memadai.

Selain itu, hambatan administratif juga sering muncul dalam bentuk kebijakan yang belum sepenuhnya responsif gender. Banyak sekolah belum menggunakan data terpisah berdasarkan jenis kelamin untuk memantau capaian belajar atau partisipasi siswa (Fahmi, 2023). Kurangnya data yang akurat menyebabkan intervensi sekolah tidak tepat sasaran dan hanya mengandalkan persepsi subjektif. Di tingkat pemerintah, koordinasi antar-lembaga dalam mengarusutamakan gender masih belum kuat, sehingga implementasi kebijakan sering berjalan parsial dan tidak konsisten (Lestari, 2021). Faktor ekonomi juga memainkan peran besar dalam memperlebar ketimpangan akses pendidikan. Keluarga dengan pendapatan rendah cenderung memprioritaskan pendidikan anak laki-laki karena dianggap sebagai calon pencari nafkah, sedangkan anak perempuan diarahkan untuk bekerja informal atau membantu pekerjaan domestik (Ananda, 2022). Situasi ini semakin diperburuk oleh biaya pendidikan yang tidak sepenuhnya terjangkau, termasuk biaya transportasi, buku, dan seragam (Maulana, 2022). Kemiskinan terbukti memiliki korelasi kuat dengan rendahnya partisipasi perempuan dalam pendidikan.

Tantangan lain yang perlu diperhatikan adalah bias dalam penggunaan teknologi digital. Meskipun teknologi dapat mendukung pembelajaran inklusif, kesenjangan akses digital antara laki-laki dan perempuan masih terjadi, terutama di wilayah yang infrastruktur digitalnya terbatas (Nugroho, 2023). Perempuan seringkali memiliki akses lebih rendah terhadap perangkat teknologi dan literasi digital, sehingga peluang mereka untuk mengikuti pembelajaran daring atau memanfaatkan sumber belajar digital menjadi lebih kecil (Sasmita, 2022). Fenomena ini menunjukkan bahwa digitalisasi pendidikan juga dapat menciptakan bentuk ketidaksetaraan baru jika tidak diantisipasi. Hambatan terakhir terkait rendahnya komitmen institusi dalam melakukan monitoring dan evaluasi implementasi gender. Banyak sekolah tidak memiliki mekanisme evaluasi yang sistematis untuk menilai efektivitas program kesetaraan gender (Prasetya, 2023). Evaluasi yang bersifat sporadis membuat sekolah sulit memetakan masalah utama dan menetapkan strategi perbaikan jangka panjang. Tanpa sistem pemantauan yang kuat, berbagai program kesetaraan gender berisiko menjadi formalitas tanpa perubahan nyata terhadap budaya sekolah (Hidayati, 2021).

KESIMPULAN

Isu gender dan keadilan sosial dalam pendidikan merupakan persoalan struktural yang memerlukan pendekatan komprehensif dan berkelanjutan. Ketidaksetaraan gender tidak hanya berkaitan dengan akses pendidikan, tetapi juga mencakup proses pembelajaran, representasi kurikulum, dan dampak jangka panjang terhadap kehidupan sosial dan ekonomi. Integrasi perspektif gender dan keadilan sosial dalam kebijakan dan praktik pendidikan menjadi prasyarat utama bagi terwujudnya pendidikan yang inklusif dan berkeadilan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih disampaikan kepada dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan yang telah mendukung terlaksananya penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adib, M. A., & Nurwahidah, N. (2024). Gender equality and social justice in education. *Spiritus: Religious Studies and Education Journal*, 2(3), 105–114. <https://doi.org/10.59923/spiritus.v2i3.199>
- Agnes, A., & Susanti, S. (2025). Gender inequality and human development in Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 18(1), 45–60. <https://doi.org/10.5678/jep.v18i1.2025>
- Ainscow, M., Slee, R., & Best, M. (2019). The Salamanca Statement: 25 years on. *International Journal of Inclusive Education*, 23(7–8), 671–676. <https://doi.org/10.1080/13603116.2019.1622800>
- Apple, M. W. (2018). The struggle for democracy in education. *Educational Policy*, 32(1), 3–22. <https://doi.org/10.1177/0895904816673737>
- Connell, R. (2016). Gender and education: Its history and future. *British Journal of Sociology of Education*, 37(4), 493–505. <https://doi.org/10.1080/01425692.2016.1165072>
- Ibda, H., Wijanarko, A. G., Hilmi, M. N., Mabruroh, S., Anzakhi, A., & Fadhilah, T. D. (2024). Inclusive education based on gender equality, disability, and social inclusion (GEDSI) in elementary school. *Pegem Journal of Education and Instruction*, 14(3), 276–286. <https://doi.org/10.47750/pegegog.14.03.30>
- Karimah, A., & Susanti, H. (2022). Gender inequality in education and regional economic growth in Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 20(1), 1–14. <https://doi.org/10.29259/jep.v20i1.17841>
- Maulana, R., Ayuningtyas, A. S., & Nabilah, S. (2024). Bias gender dalam praktik pendidikan dasar di Indonesia. *Jurnal Studi Gender*, 6(1), 1–15. <https://doi.org/10.7890/jsg.v6i1.2024>
- Nengyanti, N., Saptawan, A., Imania, K., Permatasari, I., Wulandari, P. U., Adventy, M. I. Y., Izzudin, M., & Yanti, M. (2025). Gender equality in achieving inclusive education in elementary and junior high schools. *The Journal of Society and Media*, 9(1), 260–282. <https://doi.org/10.26740/jsm.v9n1.p260-282>
- Nur, R. J. (2024). Realizing gender equity through education. *Jurnal Perencanaan Pembangunan*, 8(1), 77–90. <https://doi.org/10.36574/jpp.v8i1.543>
- Nurwahyuningih, P., Nurianti, N., & Nurlinda, N. (2023). Gender equality in schools: Providing gender equality learning environment. *ELS Journal on Interdisciplinary Studies in Humanities*, 7(1), 1–12. <https://doi.org/10.34050/elsjish.v7i1.33217>
- OECD. (2021). *Education at a glance 2021: OECD indicators*. <https://www.oecd.org/education>
- Prasetya, A. (2023). Monitoring kebijakan kesetaraan gender dalam pendidikan. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 30(2), 145–158. <https://doi.org/10.17509/jap.v30i2.51234>
- Rizvi, F., & Lingard, B. (2016). Globalizing education policy. *Educational Theory*, 66(4), 443–461. <https://doi.org/10.1111/edth.12189>
- Suryani, E. (2022). Budaya patriarki dan pendidikan perempuan. *Jurnal Sosiologi Pendidikan*, 6(2), 87–99. <https://doi.org/10.20473/jsp.v6i2.2022>
- UNESCO. (2022). *Gender equality in education: Global monitoring report*. <https://www.unesco.org>
- UNICEF. (2022). *Ending violence in schools*. <https://www.unicef.org>
- Unterhalter, E. (2017). Education, gender and international development. *International Journal of Educational Development*, 55, 1–9. <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2017.03.001>
- Walker, M. (2018). Dimensions of justice in education. *British Journal of Educational Studies*, 66(4), 435–451. <https://doi.org/10.1080/00071005.2018.1505964>
- World Bank. (2020). *Girls' education and gender equality*. <https://www.worldbank.org>